

**EVALUASI PERALIHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN MENENGAH DARI PEMERINTAH KOTA
TANJUNGPINANG KE PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2021**

**Oleh
Asura
NIM.150565201003**

Abstrak

Pasca peralihan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdapat perubahan kebijakan di pengelolaan pendidikan menengah yang dimana SMA/SMK dibawah pengelolaan kabupaten/kota kini beralih ke pemerintah provinsi. Adapun yang dialihkan ialah Personel (pendidik dan tenaga kependidikan), Sarana prasarana, penganggaran dan dokumen. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hasil peralihan kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah dari pemerintah Kota Tanjungpinang ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif Kualitatif dengan teori evaluasi kebijakan publik berdasarkan pada indikator teori William Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan menengah pasca dipemerintah provinsi. Dalam pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan belum efektif. Kedua, Sarana prasarana pasca di pemerintah provinsi menunjukkan bahwa adanya perubahan infrastruktur sekolah yang lebih baik, ketiga pengalokasian anggaran dalam penyelenggaraan pendidikan menengah belum optimal hal ini dilihat pada kurangnya kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan. Keempat, dokumen pasca di pemerintah provinsi di bentuk unit pelayanan teknis daerah (UPTD) guna membantu kerja Dinas pendidikan provinsi yang diluar daerah Provinsi Kepri.

Kata Kunci : Peralihan Kewenangan, Evaluasi Kebijakan, Pendidikan Menengah.

**EVALUATION OF THE TRANSFER OF AUTHORITY TO MANAGE
MIDDLE EDUCATION FROM TANJUNGPINANG CITY GOVERNMENT
TO THE RIAU ISLAND PROVINCE GOVERNMENT IN 2021**

**By
Asura
NIM.150565201003**

Abstract

After the transition of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, there was a policy change in the management of secondary education, where SMA/SMK under the management of the district/city are now shifting to the provincial government. The things that are transferred are personnel (educators and education staff), infrastructure, budgeting and documents. The purpose of this study is to find out how the results of the transfer of authority for the administration of secondary education from the Tanjungpinang City government to the Riau Islands Provincial Government in 2021. The method used in this research is qualitative descriptive with public policy evaluation theory based on William Dunn's theory indicators. The results showed that the implementation of post-secondary education in the provincial government. In the management of educators and education staff has not been optimal. Second, post-infrastructure facilities at the provincial government show that there is a change for the better, thirdly the budget allocation shown in the implementation of education is felt to be effective in providing both infrastructure facilities to educators and education staff. Fourth, the post-document at the provincial government is in the form of a regional technical service unit (UPTD) to assist the work of the provincial education office outside the Riau Islands Province.

Keywords: Transfer of authority, policy evaluation, Middle education.